BAB II

PELAKSANAAN PKL

2.1 Jadwal Kegiatan Selama Praktek Kerja Lapangan

Selama melaksanakan Praktek Kerja Lapangan penulis diberikan kesempatan ditempatkan dibagian Humas Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Adapun dua jenis kegiatan yang dilakukan penulis salah satunya kegiatan Rutin. Kegiatan rutin ini merupakan kegiatan yang bersifat kontinyu yang dilakukan terus-menerus dan dilakukan setiap hari kerja. Adapun contoh kegian rutin ini seperti menganalisa berita, membuat potongan berita yang berasal dari media cetak, serta mempelajari file-file Humas. Selain kegiatan rutin penulis juga melaksanakan kegiatan *Insidentil*. Kegiatan ini dikerjakan sewaktu-waktu apabila ada kepentingan perusahan yang mendesak untuk segera dilakukan. Kegiatan ini meliputi kegiatan pengenalan lingkungan tempat PKL yang dilakukan oleh penulis, mencari data, pembuatan press release, peliputan dan dokumentasi.

Uraian pelaksanaan kerja praktek yang penulis lakukan dapat dilihat lebih jelas dalam tabel 2.1 :

Tabel 2.1

Kegiatan Praktek Kerja Lapangan

yang dilakukan selama satu bulan terhitung 04 Juli s/d 04 Agustus 2011

Di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat

No	Hari / Tanggal	Kegiatan	Sifat	
			Rutin	Insidentil
1.	Senin 04-7-2011	• Pengenalan lingkungan PKL • Menganalisa (mencari) berita, membuat, menyusun potongan berita dari surat kabar mengenai Pendidikan di Jawa Barat dari media cetak. Adapun koran yang digunakan antara lain : Kompas, Pikiran Rakyat, Galamedia, Tribun Jabar, Radar Bandung, Seputar Indonesia, Harian Pelita, Suara Karya, Koran Tempo, Media Indonesia. • Mencari data Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.	✓	✓ ✓
2.	Selasa 05-7-2011	• Mencari, membuat dan menyusun potongan berita dari surat kabar menganai pendidikan di Jawa Barat • Mencari data Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.	✓	✓
3.	Rabu 06-7-2011	• Mencari, membuat dan menyusun potongan berita dari surat kabar menganai pendidikan.	✓	

No	Hari / Tanggal	Kegiatan	Sifat	
			Rutin	Insidentil
4.	Kamis 07-7-2011	• Mencari, membuat dan menyusun potongan berita dari surat kabar menganai pendidikan di Jawa Barat	✓	
5.	Jum'at 08-7-2011	• Mencari, membuat dan menyusun potongan berita dari surat kabar menganai pendidikan di Jawa Barat • Mencari data Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.	✓	✓
6.	Sabtu 09-7-2011	**Libur**		
7.	Senin 11-7-2011	• Mencari, membuat dan menyusun potongan berita dari surat kabar menganai pendidikan di Jawa Barat	✓	
8.	Selasa 12-7-2011	• Mencari, membuat dan menyusun potongan berita dari surat kabar menganai pendidikan di Jawa Barat	✓	
9.	Rabu 13-7-2011	• Mencari, membuat dan menyusun potongan berita dari surat kabar menganai pendidikan di Jawa Barat • Membuat Press Release tentang Sosialisasi BOS	✓	✓
10.	Kamis 14-7-2011	• Mencari, membuat dan menyusun potongan berita dari surat kabar menganai pendidikan di Jawa Barat • Mencari data Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.	✓	✓

No	Hari / Tanggal	Kegiatan	Sifat	
			Rutin	Insidentil
11.	Jum'at 15-7-2011	• Mencari, membuat dan menyusun potongan berita dari surat kabar menganai pendidikan di Jawa Barat • Dokumentasi gedung, ruangan dan lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat	✓	✓
12.	Sabtu 16-7-2011	**Libur**		
13.	Senin 18-7-2011	• Mencari, membuat dan menyusun potongan berita dari surat kabar menganai pendidikan di Jawa Barat	✓	
14.	Selasa 19-7-2011	• Meliput, dokumentasi dalam acara PERPEMPROV yang diselenggarakan di Gedung Sate.		✓
15.	Rabu 20-7-2011	• Mencari, membuat dan menyusun potongan berita dari surat kabar menganai pendidikan di Jawa Barat	✓	
16.	Kamis 21-7-2011	• Mencari, membuat dan menyusun potongan berita dari surat kabar menganai pendidikan di Jawa Barat	✓	
17.	Jum'at 22-7-2011	• Mencari, membuat dan menyusun potongan berita dari surat kabar menganai pendidikan di Jawa Barat	✓	
19.	Sabtu 23-7-2011	**Libur**		
20.	Senin 25-7-2011	**Izin**		

No	Hari / Tanggal	Kegiatan	Sifat	
			Rutin	Insidentil
21.	Selasa 26-7-2011	• Mencari, membuat dan menyusun potongan berita dari surat kabar menganai pendidikan di Jawa Barat	✓	
22.	Rabu 27-7-2011	• Dokumentasi menyambut Ramadhan di mesjid Baitul Solihin komplek Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.		✓
22.	Kamis 28-7-2011	• Mencari, membuat dan menyusun potongan berita dari surat kabar menganai pendidikan.	✓	
23.	Jum'at 29-7-2011	• Mencari, membuat dan menyusun potongan berita dari surat kabar menganai pendidikan di Jawa Barat	✓	
24.	Sabtu 30-7-2011	**Libur**		
25.	Senin 1-8-2011	• Mencari, membuat dan menyusun potongan berita dari surat kabar menganai pendidikan di Jawa Barat	✓	
26.	Selasa 2-8-2011	• Mencari, membuat dan menyusun potongan berita dari surat kabar menganai pendidikan di Jawa Barat	✓	
27.	Rabu 3-8-2011	• Mencari, membuat dan menyusun potongan berita dari surat kabar menganai pendidikan di Jawa Barat	✓	
28.	Kamis 4-8-2011	• Mencari, membuat dan menyusun potongan berita dari surat kabar menganai pendidikan.	✓	

Sumber : Arsip Penulis 2011

2.2 Deskripsi dan Contoh Kegiatan Rutin Selama PKL

Kegiatan Kerja Praktek yang dilakukan penulis secara rutin pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Yaitu pekerjaan yang dilakukan secara terus-menerus ataupun berangsur-angsur setiap hari. Adapun kegiatannya meliputi :

2.2.1 Mencari Berita dari Media Cetak

Pemantauan berita media cetak merupakan aktivitas yang rutin dilakukan setiap hari, dimulai pukul 07.30 pagi dengan kegiatan pertama yang dilakukan adalah membaca dan menandai berita-berita dari sejumlah koran yang berkaitan dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat ataupun seputar berita yang berkaitan dengan pendidikan di Jawa Barat. Artikel-artikel ataupun berita-berita dari sejumlah koran yang telah ditandai tersebut kemudian digunting untuk selanjutnya ditempelkan pada selembar kertas satu persatu berukuran F4 dengan menyantumkan urutan, tanggal, baris dan kolom dalam suatu surat kabar. Berikut adalah daftar media cetak yang digunakan :

- Kompas
- Pikiran Rakyat
- Galamedia
- Tribun Jabar
- Radar Bandung
- Seputar Indonesia
- Republika

- Koran Tempo
- Suara Karya

2.2.2 Membuat dan Menyusun Potongan Berita

Kegiatan membuat potongan berita adalah kegiatan melanjutkan dari pekerjaan yang pertama yaitu mencari dan mengunting berita setelah hasil potongan itu didapat tahap kedua adalah menempelkan potongan berita pada kertas berukuran F4 yang sebelumnya diprint dengan telah mengisi bersumber dari koran apa, urutan, halaman, hari, tanggal, bulan, tahun terbit berita tersebut. Setelah potongan berita tersebut ditempel, maka langkah selanjutnya adalah menyusun sesuai dengan urutan potongan berita yang telah dibuat, kemudian diserahkan kepada Koordinator Humas & Hukum untuk dijadikan sebuah kumpulan potongan berita setiap bulannya. Adapun contoh potongan berita yang siap untuk dijadikan sebuah kumpulan potongan berita setiap bulannya adalah sebagai berikut :

BERITA PEMBANGUNAN PENDIDIKAN
DINAS PENDIDIKAN PROPINSI JAWA BARAT
Nomor :753 /Hms/VII/H/2011

Media Harian/Mingguan/Bulanan/Tabloid : *Pikiran Rakyat*

Terbitan, Hari/Tanggal/Bulan/Tahun : Senin, 4 Juli 2011

Edisi/Halaman/Kolom : 21/ 2-4

Koalisi Pendidikan Akan Memantau Ketat Daftar Ulang Siswa

BANDUNG, (PR).-

Koalisi Pendidikan Kota Bandung (KPKB) akan memantau pelaksanaan daftar ulang lebih ketat jika dibandingkan dengan saat penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2011 jalur akademis. Ketua KPKB Fridolin Berek mengungkapkan, berdasarkan hasil pemantauan KPKB selama pendaftaran PPDB Senin (27/6) sampai dengan Sabtu (2/7), KPKB tidak terlalu banyak menerima aduan dari masyarakat atau orang tua dan menemukan pelanggaran.

"Yang patut diwaspadai adalah saat daftar ulang yang akan berlangsung satu hari setelah pengumuman PPDB 2011 jalur akademis. Banyak sekolah yang akan memanfaatkan momen ini untuk melakukan pungutan biaya dengan berbagai modus, termasuk di antaranya biaya seragam," kata Frido, Minggu (3/7).

Frido menyebutkan, dalam petunjuk teknis (juknis) PPDB 2011 jelas disebutkan bahwa saat pendaftaran dan daftar ulang di TK, RA, sekolah dan madrasah negeri, calon peserta didik tidak dipungut biaya apa pun. Pelaksanaan daftar ulang tidak dikaitkan dengan persyaratan keuangan dan atau hal lainnya yang berkaitan dengan keuangan seperti seragam, buku, LKS, iuran bulanan, kegiatan peserta didik, administrasi, kesehatan, psikotes, dan lain-lain.

Akan tetapi, menurut Frido, sekolah selalu memiliki alasan lain untuk memungut, yaitu untuk kegiatan masa pengenalan sekolah yang biasanya berbentuk latihan kepemimpinan. Sekolah akan berdalih, biaya itu tidak ada kaitannya dengan PPDB sehingga tidak masalah memungut biaya. "Latihan kepemimpinan dilakukan sekolah dengan bekerja sama dengan institusi militer. Biayanya sekian ratus ribu. Ini tentu saja memberatkan orang tua, tetapi orang tua juga tidak bisa menolak," ucap Frido.

Frido menyebutkan, selama pelaksanaan PPDB 2011, KPKB menerima aduan di antaranya masih ada sekolah dasar yang menyelenggarakan seleksi baca dan tulis dan ada sekolah yang memungut uang pendaftaran. Selama pemantauan, KPKB menurunkan tim sebanyak lima belas orang yang terdiri atas orang tua, guru, serta masyarakat peduli pendidikan lainnya.

KPKB juga meminta kepada Dinas Pendidikan Kota Bandung untuk tetap membuka situs PPDB Online sampai September untuk mengawasi jumlah siswa yang diterima. "Setelah pelaksanaan daftar ulang, secepatnya KPKB akan mengekspos kepada masyarakat semua aduan dan temuan selama PPDB 2011 berlangsung. Laporan ini juga akan direkomendasikan ke Dinas Pendidikan Kota Bandung agar ada sanksi untuk yang terbukti melanggar," ucap Frido.

Sementara itu, Dewan Pendidikan Kota Bandung (DPKB) menemukan beberapa pelanggaran yang terjadi selama PPDB 2011. Namun, hal tersebut belum bisa dipublikasikan, karena DPKB harus melaksanakan rapat pleno terlebih dulu.

Ketua DPKB Kusmaeni S. Hartadi mengatakan, selama PPDB 2011 DPKB menurunkan tim sebanyak tujuh belas orang. Pada pekan ini, semua anggota tim akan melaporkan temuannya, setelah itu rapat pleno, dan hasilnya akan direkomendasikan ke Dinas Pendidikan Kota Bandung. **(A-187)*****

Bandung, 4 Juli 2011
Koordinator
Humas dan Hukum,

Arden Lumbantoruan, SH.
NIP. 195601171980031011

BERITA PEMBANGUNAN PENDIDIKAN
DINAS PENDIDIKAN PROPINSI JAWA BARAT
Nomor :752 /Hms/VII/H/2011

Media Harian/Mingguan/Bulanan/Tabloid : *Seputar Indonesia*

Terbitan, Hari/Tanggal/Bulan/Tahun : Senin, 4 Juli 2011

Edisi/Halaman/Kolom : 19/ 4-6

Laporkan Sekolah Lakukan Pungutan

Penerimaan Siswa Baru Tahap II Berlangsung Hari Ini

CIREBON – Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Cirebon meminta kepada orang tua murid segera melaporkan jika menemukan sekolah yang melakukan pungutan di luar ketentuan.

Disdik Kabupaten Cirebon telah mengeluarkan ketentuan bagi sekolah negeri dari tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga SMA dilarang melakukan pungutan biaya. Pasalnya, biaya pendaftaran bagi calon siswa SD-SMP telah menggunakan Biaya Operasional Sekolah (BOS). Sedangkan, SMA diambil dari Biaya Manajemen Mutu (BOM).

"Biaya pendaftaran hanya berlaku untuk sekolah swasta, SMK dan TK. Sedangkan, sekolah negeri tidak dibenarkan melakukan pungutan," kata Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Kusnadi Muamarto.

Dia menyebutkan, biaya pendaftaran bagi calon siswa SMK pun telah ditentukan sebesar Rp85.000 sesuai dengan ketentuan yang berlaku. "Jika ada yang melebihi dari jumlah tersebut silahkan lapor," tegas Kadisdik.

Dia menjelaskan, pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2011/2012 untuk jalur umum tingkat SMP dan SMA di Kabupaten Cirebon digelar serempak hari ini hingga Kamis (8/7).

Jalur umum tersebut, kata dia, untuk penerimaan siswa yang didasarkan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN). Pendaftaran calon siswa baru di setiap sekolah tetap menggunakan *passing grade*. Untuk itu, lanjut dia, Disdik sudah menentukan jumlah rombongan belajar (rombel) bagi setiap sekolah. Karena itu, sekolah tidak dibenarkan menerima calon siswa di luar jumlah yang ditetapkan.

Terkait hal ini, pihaknya sudah mengirimkan surat perihal jumlah rombel yang diizinkan. Surat tersebut menjadi acuan setiap sekolah dalam pelaksanaan PPDB.

PPDB hari ini merupakan tahap kedua. Tahap pertama berlangsung Kamis (30/6) hingga Sabtu (2/7) kemarin. Tahap penerimaan ini dikhususkan bagi jalur prestasi dan anak guru.

Sementara itu, tahap ketiga akan berlangsung pada 18-23 Juli mendatang. Tahap ini diperuntukkan bagi sekolah swasta. "Sejak tahap awal PPDB sebenarnya sekolah swasta diperbolehkan untuk memulai proses penerimaan siswa baru," tambahnya.

Bersamaan dengan itu, sejak 18-31 Juli nanti berlaku PPDB tahap empat. Tahap ini merupakan waktu penerimaan siswa baru di SMP Terbuka dan Paket B.

•erika lia

Bandung, 4 Juli 2011
Koordinator
Humas dan Hukum,

Arden Lumbantoruan, SH.
NIP. 195601171980031011

BERITA PEMBANGUNAN PENDIDIKAN
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT
Nomor: 761 Hms/ VII/H/2011

Media Harian/Mingguan/Bulanan/Tabloid : *TRIBUN*

Terbitan, Hari/Tanggal/Bulan/Tahun : Selasa, 5 Juli 2011

Edisi/Halaman/Kolom : 6/1

Nilai Memuaskan Terlempar dari Sekolah Negeri

Orangtua Siswa Kecewa Teknis PPDB

LEUWIGAJAH, (GM).-

Sejumlah orangtua siswa kecewa dengan *passing grade* SMP dan SMA di Kota Cimahi yang cepat berubah sehingga sulit diprediksi dan akhirnya anak mereka gagal masuk sekolah yang diinginkan. Akibatnya keinginan menyekolahkan anak ke sekolah negeri tidak tercapai karena Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) serentak ditutup Sabtu (2/7) lalu.

Seperti diungkapkan Sari (34) yang anaknya gagal masuk SMPN 8 Cimahi. "Pada hari Sabtu pukul 10.00 WIB, *passing grade* masih berada di posisi 23,45. Namun dalam hitungan per jam sudah mencapai 24,10. Saya sungguh kecewa, dalam waktu sekian jam *passing grade* sudah naik. Kasihan anak saya gagal masuk SMP ini hanya beda koma. Kalau begini mau dibawa ke mana pendidikan kita? Tolong kepada Mendiknas agar membuat sistem penerimaan siswa yang tidak membingungkan. Sebelum pendaftaran *passing grade* harusnya sudah dipastikan," ungkap Sari dengan nada kesal.

Nasib sama juga dialami Agus, ketika anaknya gagal masuk SMPN 2 Cimahi hanya dengan selisih 0,5. "Awalnya, saya optimistis karena nilai anak saya 26,00 tetapi ketika penutupan pendaftaran *passing grade* di SMP 2 ini 26,05 dan akhirnya anak saya gagal masuk. Lalu saya tarik syarat-syarat pendaftaran di SMP 2 untuk daftar ke SMPN negeri yang lain, tapi ternyata sudah tutup semuanya. Kasihan sekarang anak saya belum dapat sekolah dan mengurung diri di kamar, padahal selalu juara kelas," ungkapnya.

Berdasarkan pantauan "GM", sampai Senin (4/7), SMP Negeri 8 Cimahi telah mematok *passing grade* 24,10 untuk peserta dalam Kota Cimahi dan 24,24 untuk peserta luar Kota Cimahi. Hasil ini masih bersifat sementara karena masih menunggu hasil rekap dengan Dinas Pendidikan (Diknas) Kota Cimahi. Dari 728 peserta, hanya 400 yang diterima di SMP Negeri 8 Cimahi.

Menanggapi hal tersebut Wakil Ketua PDDB SMP Negeri 8 Cimahi, Kasman menyarankan agar siswa yang tidak diterima bisa mendaftarkan ke sekolah swasta. "Para orangtua harus selalu memantau hasil *passing grade* karena setiap jam bisa berubah, hal seperti itu supaya nem yang kecil bisa segera mendaftar ke sekolah swasta," jelas Kasman.

SMA Negeri 4 Cimahi memasang *passing grade* 31,15 untuk peserta dalam Kota Cimahi dan 33,20 untuk peserta luar Kota Cimahi. Hasil ini juga masih bersifat sementara dan baru diumumkan Selasa (5/7) hari ini.

Sesuai perwa

Ketua Panitia PDDB SMA Negeri 4 Cimahi, Saefu menyampaikan, pihaknya sudah melaksanakan PPDI sesuai Perwal Cimahi. "Kami sudah bertindak sesua perwal dengan menerima 10 persen dari luar Kota Cimah dan lebih mengutamakan peserta dari Kota Cimahi. Bagi yang tidak diterima disarankan mendaftar ke sekolah swata karena mereka sudah siap," jelas Saeful.

Sementara itu menanggapi banyaknya kekecewaan para orangtua yang anaknya tidak masuk SMP tujuan, karena sistem pendaftaran yang hanya boleh satu pilihan, Kepala Seksi Kurikulum Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi, Dadan Hermawan menyampaikan, pada PPDB ini orangtua harus memantau perkembangan *passing grade*.

"Bila sudah tidak memungkinkan masuk SMP pilihan maka boleh mencabut pendaftaran dan mendaftarkan ke sekolah negeri lain. Jadi meskipun pendaftaran hanya 1 sekolah tetapi masih ada pilihan dengan mendaftar ke sekolah negeri. Jika kesempatan kedua sudah tertutup maka bisa mendaftar ke sekolah swasta," kata Dadan.

Dikatakan Dadan banyaknya kekecawaan orangtua tersebut karena mereka masih berpikir belajar di sekolah negeri menjadi satu-satunya pilihan. Padahal jika melihat jumlah lulusan SD di Cimahi sebanyak 7.515 tidak sebanding dengan kuota SMP negeri di Cimahi yaitu 3.800 siswa. Sehingga sisanya harus ada yang bersekolah di SMP swasta.

Sekolah swasta pun tidak perlu khawatir kekurangan murid, karena akan banyak siswa yang gagal masuk SMP negeri dan memilih bersekolah di SMP swasta. Sama seperti SMP negeri, pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga memberikan dana bantuan operasional sekolah (BOS) bagi SMP swasta. **(B.109/rvi.job)****

Bandung, 5 Juli 2011
Humas dan Hukum
Koordinator,

Arden Lumbantoruan, SH
Nip. 19561171198031011

BERITA PEMBANGUNAN PENDIDIKAN
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT
Nomor: 756 Hms/ VII/H/2011

Media Harian/Mingguan/Bulanan/Tabloid : *PIKIRAN RAKYAT*

Terbitan, Hari/Tanggal/Bulan/Tahun : Selasa, 5 Juli 2011

Edisi/Halaman/Kolom : 21/2-4

Baru Dua Kabupaten yang Mencairkan Dana BOS Provinsi

BANDUNG, (PR).-
Meski peraturan gubernur mengenai pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Provinsi Jawa Barat telah terbit sejak awal Juni lalu, sampai dengan saat ini baru dua kabupaten di Jawa Barat yang sudah mencairkan BOS provinsi. Dua daerah tersebut adalah Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Bandung.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Dede Hasan yang ditemui di ruang kerjanya di Jln. Dr. Radjiman Bandung, Senin (4/7).

Menurut Dede, baru Sumedang dan Kabupaten Bandung yang telah menyelesaikan persyaratan administrasi dan sudah terbit surat perintah pencairan dananya sehingga bisa langsung dicairkan dan masuk ke masing-masing kas daerah. Dua daerah lain yang sedang dalam proses pencairan adalah Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Kuningan, sementara daerah lainnya belum tuntas menunggu penandatanganan oleh bupati dan wali kota.

"Sebetulnya kami sudah berupaya untuk akselerasi dan meminta 30 Juni kemarin harus sudah diselesaikan, tetapi ternyata sulit. Oleh karena itu, kami memutuskan untuk mencairkan daerah yang telah menyelesaikan terlebih dahulu," ujarnya.

Jumlah dana BOS yang dicairkan untuk Sumedang, kata Dede lebih dari Rp 9 miliar sementara untuk Kabupaten Bandung mencapai Rp 29 miliar. Rinciannya terdiri atas, Sumedang sebanyak 118.046 murid SD/MI dengan dana Rp 2,95 miliar dan 55.055 siswa SMP/MTs. dengan dana Rp 7,01 miliar. Sementara Kabupaten Bandung terdiri atas 402.926 murid SD/MI dengan dana Rp 10 miliar lebih dan 149.056 siswa SMP/MTs. dengan dana Rp 19 miliar lebih.

"Satuannya masih tetap, untuk SD Rp 25.000 per siswa per tahun, sedangkan SMP Rp 127.500 per siswa per tahun. Berbeda dengan BOS pusat, pencairan BOS provinsi dilakukan sekaligus untuk satu tahun," tuturnya.

Secara keseluruhan, menurut Dede, dana BOS provinsi yang dialokasikan di tahun 2011 ini mencapai Rp 405 miliar. Jumlah tersebut diperuntukkan bagi 5.360.000 murid SD/MI dengan dana Rp 134 miliar dan 2.130.156 siswa SMP/MTs. dengan dana Rp 271,59 miliar. Dede menuturkan, BOS provinsi yang diberikan kepada seluruh siswa SD/SMP baik negeri maupun swasta ini bentuknya adalah bantuan keuangan yang akan masuk dulu ke kas daerah atau APBD dan harus menempuh paripurna. Dia berharap daerah bisa mengeluarkan kebijakan khusus agar dana BOS ini tidak terlalu lama menempuh birokrasi. "Jangan sampai masuk ke perubahan, karena akan lama lagi," tuturnya. **(A-157)*****

Bandung, 5 Juli 2011
Humas dan Hukum
Koordinator,

Arden Lumbantoruan, SH
Nip. 19561171198031011

BERITA PEMBANGUNAN PENDIDIKAN
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT
Nomor: 763 Hms/ III/H/2011

Media Harian/Mingguan/Bulanan/Tabloid : *GALAMEDIA*

Terbitan, Hari/Tanggal/Bulan/Tahun : Selasa, 5 Juli 2011

Edisi/Halaman/Kolom : 2/2-4

Pencairan BOS Terhambat Birokrasi

RADJIMAN, (GM).-

Baru dua kabupaten di Jabar yang mencairkan dana bantuan operasional sekolah (BOS) provinsi. Keduanya yakni Kab. Sumedang dan Bandung, sedangkan Kab. Sukabumi dan Kuningan masih dalam proses.

"Yang lainnya belum mengajukan proposal pencairan dana BOS provinsi. Saya kurang tahu penyebabnya, apakah birokrasi di daerah atau hal lain," ungkap Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Pendas) Dinas Pendidikan Jabar, Drs. Dede Hasan Kurnaedi kepada wartawan di ruang kerjanya, Senin (4/7).

Dede memperkirakan, daerah yang belum mengajukan proposal pengajuan dana BOS ini, terkendala birokrasi di daerah tersebut. Selain itu setiap daerah harus mengajukan kuitansi yang ditandatangani pimpinan daerah (bupati/wali kota).

"Birokrasi inilah yang sering terjadi dalam pencairan dana BOS provinsi," tandasnya.

Padahal Disdik Jabar sudah meminta setiap kabupaten kota untuk segera mengajukan proposal pengajuan pencairan dana BOS provinsi paling lambat 30 Juni lalu. Namun kenyataannya hanya dua daerah yang serius mengajukan proposal, yakni Kab. Sumedang dan Kab. Bandung, disusul Kab. Sukabumi dan Kuningan.

"Padahal sekarang sudah masuk bulan Juli, namun belum ada lagi kabupaten kota yang memasukkan proposal pengajuan pencairan dana BOS provinsi," tambahnya.

Dede menyebutkan, pencairan dana BOS provinsi ini lebih cepat dari tahun sebelumnya. Apalagi saat ini tengah sibuk-sibuknya penerimaan peserta didik baru (PPDB), sehingga sekolah maupun siswa membutuhkan dana.

"Intinya dana BOS ini diperuntukkan bagi biaya operasional siswa di sekolah," tandasnya.

Dana BOS provinsi yang dicairkan ke kedua kabupaten tersebut mencapai Rp 39 miliar lebih dari jumlah total BOS provinsi Jabar yang mencapai Rp 495 miliar.

Dede memastikan, dana BOS provinsi tersebut dipastikan sudah bisa dicairkan karena surat permintah pencairan dana (SP2D) nya sudah turun. (B.8)**

Kab. Bandung dan Sumedang Cairkan BOS

Kab. Sumedang:
118.046 siswa SD : Rp 2,955 miliar
55.055 siswa SMP : Rp [illegible]019 miliar

Kab. Bandung:
402.926 siswa SD : Rp 10,075 miliar
149.056 siswa SMP : Rp 19,004 miliar

Bandung, 10 Juni 2011
Humas dan Hukum
Koordinator,

Arden Lumbantoruan, SH
Nip. 19561171198031011



BERITA PEMBANGUNAN PENDIDIKAN
DINAS PENDIDIKAN PROPINSI JAWA BARAT
Nomor :776 /Hms/VII/H/2011

Media Harian/Mingguan/Bulanan/Tabloid : *GALAMEDIA*

Terbitan, Hari/Tanggal/Bulan/Tahun : Senin, 6 Juli 2011

Edisi/Halaman/Kolom : 6/ 1

Bukti Peningkatan Kualitas Pendidikan

"Passing Grade" SMP dan SMA Naik

RD. DEMANG HARDJAKUSUMAH, (GM).-

Passing grade sekolah menengah pertama (SMP) negeri dan sekolah menengah atas (SMA) negeri di Kota Cimahi mengalami kenaikan hingga sampai 2 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menjadi tolak ukur peningkatan mutu dan kualitas pendidikan di Kota Cimahi.

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kota Cimahi, Tata Wikanta saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (5/7) mengatakan, *passing grade* SMP dan SMA negeri di Cimahi telah ditetapkan melalui rapat panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Senin (4/7) sore dan diumumkan kemarin.

Menurut Tata, diliat dari *passing grade* masing-masing sekolah, rata-rata mengalami kenaikan sekitar 1 sampai 2 poin. "Ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas pendidikan, karena selain *passing grade* naik, hasil kelulusan ujian nasional (UN) siswa SMP dan SMA juga mengalami kenaikan," paparnya.

Tata menyebutkan, *passing grade* tertinggi untuk SMP sebesar 26,55 poin di SMPN 2 dan *passing grade* terendah sebesar 20,95 di SMPN 11. Sedangkan *passing grade* tertinggi untuk SMA sebesar 33,70 di SMAN 1 dan terendah sebesar 22,30 di SMAN 6.

Mengenai jumlah siswa baru yang diterima di SMP dan SMA negeri, Tata mengatakan, jumlah siswa baru yang diterima di SMP negeri sebanyak 3.598 orang dari jumlah pendaftar sebanyak 6.298 orang. Sedangkan jumlah siswa baru yang diterima ke SMA negeri sebanyak 1.985 orang dari 3.004 pendaftar dan siswa baru yang diterima di sekolah menengah kejuruan (SMK) negeri sebanyak 723 orang dari 848 pendaftar.

Sekolah swasta

Tata menyakinkan kepada orangtua siswa, supaya tidak khawatir anaknya tidak bisa bersekolah di Kota Cimahi, karena jumlah SMP negri dan swasta di Cimahi dapat menampung seluruh siswa lulusan sekolah dasar (SD) maupun SMP dari Cimahi. Sekalipun ada yang datang dari luar Cimahi, tetapi jumlah siswa asal Kota Cimahi yang mutasi ke luar Cimahi pun cukup banyak.

"Setelah pengumuman *passing grade* ini, orangtua siswa yang anaknya tidak diterima di SMP dan SMA negeri supaya segera mendaftarkan anaknya ke sekolah swasta yang masih membuka pendaftaran. Jangan takut masuk sekolah sawasta, karena beberapa sekolah swasta justru menyediakan jurusan yang tidak ada di sekolah negeri. Seperti jurusan farmasi," jelas Tata.

Selain bersekolah di sekolah formal, Tata mengatakan, lulusan SD dan SMP bisa melanjutkan pendidikan di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Saat ini di Kota Cimahi ada 25 PKBM yang siap menampung lulusan SD dan SMP.

Hal senada disampaikan Kepala Seksi Kurikulum Pendidikan Dasar Disdikpora Kota Cimahi, Dadan Hermawan. Menurutnya, banyaknya orangtua yang kecewa anaknya tidak masuk sekolah negeri karena masih beranggapan bahwa sekolah di negeri menjadi satu-satunya pilihan. Padahal lulusan SD di Kota Cimahi mencapai 7.515 orang, sehingga tidak sebanding dengan kuota siswa baru di SMP negeri yang hanya 3.800 orang.

"Siswa yang tidak diterima di sekolah negeri, harus bersekolah di SMP swasta. Sekolah swasta pun tidak perlu khawatir akan kekurangan murid, karena banyak siswa yang tidak diterima masuk ke SMP negeri, mereka akan bersekolah di SMP swasta. Sama seperti SMP negeri, pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga memberikan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMP swasta," paparnya. **(B.109/rvi.job)****

Bandung, 6 Juli 2011
Koordinator
Humas dan Hukum,

Arden Lumbantoruan, SH.
NIP. 195601171980031011

BERITA PEMBANGUNAN PENDIDIKAN
DINAS PENDIDIKAN PROPINSI JAWA BARAT
Nomor :779 /Hms/VII/H/2011

Media Harian/Mingguan/Bulanan/Tabloid : ***KOMPAS***

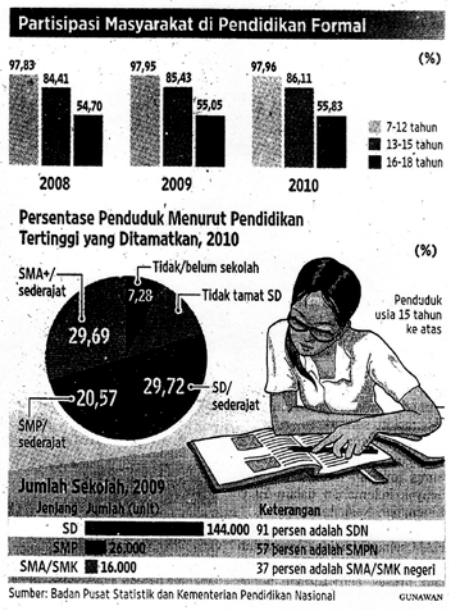
Terbitan, Hari/Tanggal/Bulan/Tahun : Senin, 6 Juli 2011

Edisi/Halaman/Kolom : 1/ 2-4

Sekolah Semakin Sulit dan Mahal

RSBI Hanya Dinikmati Siswa Kaya

JAKARTA, KOMPAS – Memasuki tahun ajaran baru, sejumlah orangtua di berbagai daerah dipusingkan dengan semakin sulitnya mencari sekolah berkualitas dan semakin mahalnya biaya sekolah. Meskipun sudah ada dana yang dikucurkan pemerintah untuk setiap sekolah, kenyataannya hal itu tidak mengurangi pungutan yang dilakukan sekolah terhadap orangtua siswa.



Kesulitan utama siswa dan orangtua terutama karena sebagian sekolah publik berkualitas baik sudah berubah menjadi rintisan sekolah berstandar internasional (RSBI). Untuk RSBI, selain tes masuk lebih awal pada Maret-Mei, sekolah bebas memungut biaya masuk dari orangtua siswa. Di Kota Cirebon, Bandung, dan Jakarta, misalnya, biaya masuk SMP negeri berstatus RSBI minimal Rp 6 juta. Adapun biaya masuk untuk SMA negeri berstatus RSBI bisa di atas Rp 15 juta.

Siswa yang masuk kelas bilingual di SMA negeri di Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, dikenai uang pangkal Rp 3,8 juta dan biaya lain-lain Rp 2,1 juta atau total Rp 5,9 juta. Belum lagi uang sekolah yang besarnya dipatok Rp 300.000 per bulan.

Di Jakarta Selatan, SMP bilingual yang belum RSBI mematok sumbangan Rp 6 juta per siswa yang bisa dicicil setahun. Adapun untuk RSBI, biayanya lebih besar lagi.

"Anak-anak cerdas dari keluar-

Bandung, 6 Juli 2011
Koordinator
Humas dan Hukum,

Arden Lumbantoruan, SH.
NIP. 195601171980031011

BERITA PEMBANGUNAN PENDIDIKAN
DINAS PENDIDIKAN PROPINSI JAWA BARAT
Nomor :781 /Hms/VII/H/2011

Media Harian/Mingguan/Bulanan/Tabloid : ***SEPUTAR INDONESIA***

Terbitan, Hari/Tanggal/Bulan/Tahun : Senin, 6 Juli 2011

Edisi/Halaman/Kolom : 15/ 1-3

Pungutan Liar

Disdik Panggil Kasek SD Eretan Kulon IV

INDRAMAYU – Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Indramayu segera memanggil Kepala Sekolah SD Eretan Kulon IV terkait pungutan liar yang dilaporkan orang tua siswa.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu Muhammad Rahmat mengatakan, pihaknya segera memanggil untuk meminta klarifikasi pihak sekolah tentang laporan dugaan pungutan liar yang disampaikan para orang tua siswa. "Terkait laporan orang tua siswa, kami akan meminta klarifikasi kepada kepala sekolah, apakah sudah dilakukan sesuai prosedur atau belum," ujarnya.

Disdik memastikan, pemanggilan kepala sekolah ini akan dilakukan dalam waktu dekat. "Pengaduan orang tua siswa akan kami *cross check* dulu untuk memastikan kebenarannya," kata Rahmat.

Rahmat mengakui, sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2008, sekolah sebenarnya diperbolehkan melakukan pungutan asalkan dilakukan sesuai prosedur. Namun, hal itu harus dilakukan melalui kesepakatan antara komite sekolah dengan orang tua siswa tanpa adanya tekanan.

Sejumlah orang tua siswa SDN Eretan Kulon IV, Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu, memprotes adanya dugaan pungutan di SD tersebut. Informasi yang di-peroleh, mereka merasa keberatan dengan adanya pungutan Rp100.000 untuk menebus ijazah siswa kelas VI.

"Kami selaku orang tua siswa sangat kecewa dengan adanya pungutan yang dilakukan oknum sekolah," ungkap Sutinah, 35, salah satu orang tua murid kelas VI SD Eretan Kulon IV. Sutinah menganggap pungutan yang dilakukan perinciannya tidak jelas.

Ketua Fraksi PDI-P DPRD Kabupaten Indramayu Ruwadi Budiman mengaku, prihatin dengan adanya pungutan liar di sekolah.

●tomi indra

Bandung, 6 Juli 2011
Koordinator
Humas dan Hukum,

Arden Lumbantoruan, SH.
NIP. 195601171980031011

BERITA PEMBANGUNAN PENDIDIKAN
DINAS PENDIDIKAN PROPINSI JAWA BARAT
Nomor :788 /Hms/VII/H/2011

Media Harian/Mingguan/Bulanan/Tabloid : ***SUARA KARYA***

Terbitan, Hari/Tanggal/Bulan/Tahun : Senin, 6 Juli 2011

Edisi/Halaman/Kolom : 12/ 6-7

PROGRAM UNPP

Pemkab Indramayu Targetkan Lulus 95 Persen

INDRAMAYU (Suara Karya): Sebanyak 944 peserta mengikuti ujian nasional program paket (UNPP) C di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, tahun ajaran 2011 yang dilaksanakan selama empat hari di tiga lokasi berbeda.

UNPP dilaksanakan di SMA PGRI 2 Indramayu, SMPN 3 Sindang, dan SMPN 4 Sindang, Indramayu. Hal ini dilaksanakan untuk memberikan peluang kepada siswa putus sekolah agar dapat melanjutkan dengan program kejar paket C dan dilakukan dengan anggaran APBN.

Program ini dilaksanakan untuk menyerap dan menanggulangi siswa yang tidak terserap oleh pendidikan formal secara umum. Dengan demikian, mereka bisa mengikuti pendidikan ke jenjang berikutnya dan berhak mendapatkan ijazah, tentunya bagi yang lulus ujian sesuai dengan amanah dari Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Juga pada pasal 32 tentang pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus.

Hal ini seperti diungkapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu H Muhammad Rakhmat, MH, selaku penanggung jawab UNPP. Didampingi Kabid Pendidikan Luar Sekolah (PLS) H Masdik sebagai Ketua Panitia UNPP C, melalui Kasi Kesetaraan Dinas Pendidikan Indramayu Ristoyo sebagai Sekretaris Panitia UNPP C, menjawab pertanyaan *Suara Karya* di ruang kerjanya, Selasa (5/7).

Sekretaris UNPP C Ristoyo menjelaskan bahwa program UNPP C dilaksanakan karena sesuatu hal yang terjadi oleh siswa yang bersangkutan, seperti disebabkan oleh adanya bencana alam, karena adanya kesulitan ekonomi, keadaan darurat, dan bagi mereka yang berada di tempat terpencil.

"Termasuk bagi mereka yang IQ-nya terbilang superior dan retardasi (keterbelakangan), termasuk mendapatkan layanan pendiddikan khusus," ucap Ristoyo. Menurut Ristoyo, tahun 2011 peserta ujian nasional program paket C di Kabupaten Indramayu berjumlah 944 warga belajar. **(Kuryana)**

Bandung, 6 Juli 2011
Koordinator
Humas dan Hukum,

Arden Lumbantoruan, SH.
NIP. 195601171980031011

BERITA PEMBANGUNAN PENDIDIKAN
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT
Nomor: 789 Hms/ VII/H/2011

Media Harian/Mingguan/Bulanan/Tabloid : *PIKIRAN RAKYAT*

Terbitan, Hari/Tanggal/Bulan/Tahun : Kamis, 7 Juli 2011

Edisi/Halaman/Kolom : 21/1-2

Wali Kota dan DPRD Harus Bersikap Soal Pungutan

BANDUNG, (PR).-

Maraknya pungutan yang terjadi saat daftar ulang penerimaan peserta didik baru (PPDB) merupakan salah satu bentuk pelanggaran berat yang seharusnya menjadi perhatian pemerintah daerah. Ketua Forum Orang Tua Siswa (Fortusis) Kota Bandung Dwi Subawanto mengatakan, seharusnya DPRD dan Wali Kota Bandung marah, karena sudah membuat aturan, tetapi malah tidak ditaati.

"Petunjuk teknis (juknis) PPDB itu peraturan yang sekelas peraturan wali kota, tetapi malah tidak dipatuhi. Seharusnya bukan masyarakat saja yang marah, yang bikin aturan juga seharusnya marah. Pada akhirnya hanya menjadi masalah klasik yang terjadi berulang," kata Dwi, Rabu (6/7).

Selama ini, kata Dwi, jika ada sekolah yang ketahuan melanggar juknis PPDB sanksinya tidak memberi efek jera. Jika ingin memperbaiki, menurut Dwi, harus membongkar sistem oleh semua pemangku kepentingan *(stakeholder)* pendidikan. Kalau tidak ada perubahan sistem sama sekali, masalahnya akan tetap berulang, dan lama-kelamaan masyarakat akan menganggap wajar.

Hak informasi

Terkait hal ini, Anggota Komisi Informasi Dan Satriana mengungkapkan, orang tua memiliki hak untuk meminta informasi pengelolaan keuangan ke sekolah. Orang tua juga berhak berpartisipasi dalam perencanaan program sekolah. Sementara itu, sekolah berkewajiban memberikan informasi pengelolaan keuangan kepada orang tua. Jika sekolah tidak melaksanakan kewajibannya, dan orang tua atau masyarakat tidak meminta haknya karena hambatan psikologis, seharusnya Disdik memediasi.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Oji Mahroji mengungkapkan, untuk menindaklanjuti aduan masyarakat terkait pungutan, dia akan melakukan inspeksi ke sekolah-sekolah. Jika ada sekolah yang kedapatan melakukan pungutan, Disdik akan langsung memanggil kepala sekolah yang bersangkutan. **(A-187)*****

Modus Pungutan yang Diminta Sekolah

No.	Modus Pungutan	Nilai
1.	Seragam (topi, seragam putih-merah, pakaian olah raga, batik, dan kaus kaki)	Rp 100.000 s.d. Rp 600.000
2.	Latihan kepemimpinan	Rp 200.000 s.d. Rp 450.000
3.	Sumbangan sukarela, dana pembangunan (ada sekolah yang menetapkan jumlah minimal sumbangan)	Mencapai angka jutaan rupiah

Sumber: *diolah dari wawancara dan penelusuran di lapangan*

Bandung, 7 Juli 2011
Humas dan Hukum
Koordinator,

Arden Lumbantoruan, SH
Nip. 19561171198031011

BERITA PEMBANGUNAN PENDIDIKAN
DINAS PENDIDIKAN PROPINSI JAWA BARAT
Nomor :777 /Hms/VII/H/2011

Media Harian/Mingguan/Bulanan/Tabloid : ***GALAMEDIA***

Terbitan, Hari/Tanggal/Bulan/Tahun : Jum'at, 8 Juli 2011

Edisi/Halaman/Kolom : 1/ 2-5

Instruksi Oji Tak Digubris

■ *Dada Akan Panggil Kadisdik*



MARTADINATA, (GM).- Aksi pungutan uang pada tahun ajaran baru 2011/2012 terus mengemuka. Forum Orangtua Siswa (Fortusis) kembali mendapatkan laporan tentang dugaan pungutan paksa yang dilakukan SMAN 9 kepada peserta didik baru untuk kegiatan program bela negara dan pembelian uang seragam senilai Rp 750 ribu.

Padahal sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, Oji Mahroji telah menginstruksikan agar sekolah di semua tingkatan tidak memungut uang dengan dalih apa pun. Tapi rupanya, imbauan itu tidak digubris pihak sekolah.

Menurut Ketua Fortusis, Dwi Subawanto, dua orangtua peserta didik datang langsung ke Fortusis, Kamis (7/7), dan melaporkan adanya pungutan tersebut. Pungutan sebesar Rp 750 ribu dilakukan saat daftar ulang dan diberitahukan secara resmi dengan menggunakan kop koperasi SMAN 9.

"Dana Rp 750 ribu diperuntukkan bagi dua pembi-

Bersambung ke hlm. 19 klm. 1

JENIS PUNGUTAN	JANJI KADISDIK
Dana sukarela atau dana tetap	Tidak akan menjatuhkan mata
Dana Pramuka/OSIS	Bawa kasus pungutan
Dana tetap DSP	ke inspektorat.
Dana perpustakaan	Sekolah jangan paksa
Dana tetap beragam	siswa miskin.
Dana latihan kepemimpinan	Semua tapi cap dilarang
Dana bela negara	Segera panggil sekolah yang melakukan pungutan
Besar Pungutan:	Ban sanksi pihak sekolah.
Rp 500.000 hingga Rp 3 juta	

Bandung, 8 Juli 2011
Koordinator
Humas dan Hukum,

Arden Lumbantoruan, SH.
NIP. 195601171980031011

BERITA PEMBANGUNAN PENDIDIKAN
DINAS PENDIDIKAN PROPINSI JAWA BARAT
Nomor :779 /Hms/VII/H/2011

Media Harian/Mingguan/Bulanan/Tabloid : ***PELITA***

Terbitan, Hari/Tanggal/Bulan/Tahun : Jum'at, 8 Juli 2011

Edisi/Halaman/Kolom : 5/ 1-3

Anggaran BOS 2012 Ditambah 7,5 Trilliun

Sekolah Tidak Lagi Lakukan Pungutan Liar

Jakarta, Pelita

Pemerintah berupaya memenuhi 100 persen biaya operasional sekolah nonpersonalia. Pemenuhan biaya, yang semula dianggarkan pada tahun depan, direncanakan akan dipercepat mulai awal tahun ajaran baru ini. Dengan adanya penambahan ini diharapkan tidak ada lagi pungutan-pungutan liar.

"Selama ini, pemenuhan Biaya Operasional Sekolah (BOS) baru mencover 70 persen sekolah yang ada, dengan adanya penambahan diharapkan bisa mencapai 100 persen, "kata Wakil Menteri Pendidikan Nasional (Wamendiknas) Fasli Jalal di Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) di Jakarta, Rabu (6/07) sore.

Lebih lanjut Fasli mengatakan, sisa pemenuhan 30 persen anggaran sudah dimasukkan ke dalam pagu indikatif untuk disediakan pada 2012. Hal ini, sudah mendapatkan persetujuan dari pemerintah dan tahap awal pembahasan dengan Komisi X. "Tetapi karena Presiden dan Menkokesra melihat ini penting, ada arahan supaya kalau ada peluang dipercepat sejak awal tahun ajaran baru ini," katanya.

Namun pada saat ini, Kemdiknas menunggu arahan lebih lanjut dari Wakil Presiden sebagai Ketua Komite Pendidikan dan Menkokesra sebagai Ketua Harian. "Nanti beliau akan membuat pernyataan-pernyataan, yang artinya 30 persen ini harus secepatnya," kata Fasli.

Fasli menjelaskan, untuk memenuhi 100 persen biaya operasional pendidikan melalui BOS pada 2012 dibutuhkan hampir Rp 7,5 triliun dana tambahan. Dia menyebutkan, jika dimajukan pada Juli-Desember tahun ini maka diperlukan tambahan Rp 3,7 triliun agar memenuhi 100 persen biaya operasional sekolah secara nasional.

Biaya operasional pendidikan meliputi biaya operasional personalia dan nonpersonalia. Adapun biaya operasional personalia meliputi gaji dan tunjangan pendidik dan tenaga kependidikan. Sementara biaya nonpersonalia diantaranya meliputi alat tulis sekolah, alat dan bahan habis pakai, pemeliharaan dan perbaikan, dan biaya pelaporan.

Fasli menyebutkan, dana BOS pada awal 2006 sebanyak Rp 5 triliun. Jumlahnya, kata dia, kini meningkat menjadi Rp 16 triliun dan dengan tambahan BOS dari Kementerian Agama maka total keseluruhan Rp 20 triliun. "Kita berharap di SD dan SMP semua biaya operasi nonpersonalia ini harus tuntas ditanggung oleh dana BOS,"jelasnya.

Di tempat terpisah Menko Kesra, Agung Laksono, mengatakan kenaikkan anggaran untuk BOS 2012 agar 'Pendidikan untuk Semua' benar-benar dapat dinikmati oleh semua siswa di berbagai tingkatan, di semua jenjang, dan di setiap daerah.

Untuk itu diharapkan pada 2011 ini juga naik, sehingga kenaikan anggaran BOS pada tahun depan tidak terlalu melonjak. Sedangkan masih adanya kabupaten yang belum menyalurkan dana BOS, pemerintah juga akan memberikan sanksi. Apa bentuknya, dilihat dari kelalaian yang dilakukan. Bisa berupa teguran, surat peringatan, hingga pemecatan.

"Yang memberikan sanksi tetap pemda, bukan pemerintah pusat. Diharapkan tidak ada lagi alasan daerah untuk memperlambat penyaluran BOS karena itu hak peserta didik. Jangan sampai juga ada sekolah yang melakukan pinjaman untuk menutupi biaya operasional sekolahnya," tegasnya. **(mth)**

Bandung, 8 Juli 2011
Koordinator
Humas dan Hukum,

Arden Lumbantoruan, SH.
NIP. 195601171980031011

BERITA PEMBANGUNAN PENDIDIKAN
DINAS PENDIDIKAN PROPINSI JAWA BARAT
Nomor :780 /Hms/VII/H/2011

Media Harian/Mingguan/Bulanan/Tabloid : ***KOMPAS***

Terbitan, Hari/Tanggal/Bulan/Tahun : Jum'at, 8 Juli 2011

Edisi/Halaman/Kolom : 12/ 6-7

ANGGARAN PENDIDIKAN

Dana Pendidikan Sulit Diserap

JAKARTA, KOMPAS — Kondisi penyerapan anggaran yang rendah di Kementerian Pendidikan Nasional pada semester I-2011 dikhawatirkan akan membawa dampak buruk hingga akhir tahun. Kementerian Pendidikan Nasional masih bergelut dengan reorganisasi internalnya sehingga anggaran yang sudah dialokasikan dalam APBN 2011 belum terserap, tetapi akan menerima tambahan dana lagi pada APBN Perubahan 2011.

"Program-program pendidikan utamanya sudah bagus, terutama bantuan operasional sekolah (BOS). Namun, yang menjadi masalah, program yang terkait dengan Kementerian Pendidikan Nasional sedang menggelar reorganisasi. Meski demikian, mereka berjanji akan mempercepat penyerapannya pada akhir tahun ini," ujar Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati di Jakarta, Kamis (7/7), seusai menghadiri Sidang Paripurna DPR tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN 2010.

Anggaran bertambah

Akibat bertambahnya anggaran belanja negara dari Rp 1.229,56 triliun menjadi Rp 1.313,45 triliun (meningkat Rp 83,89 triliun), anggaran pendidikan pun bertambah 20 persen dari Rp 248,98 triliun menjadi Rp 265,56 triliun.

Alokasi tambahan anggaran pendidikan ini masih akan ditetapkan dalam pembahasan dengan Badan Anggaran DPR.

Anny Ratnawati mengatakan terjadi reorganisasi di Kementerian Pendidikan Nasional, yakni bertambahnya eselon satu. "Perubahan itu membutuhkan revisi anggaran," ujarnya.

Menurut Anny, untuk mendapatkan tambahan anggaran pendidikan itu, setiap kementerian dan lembaga harus berlomba untuk memperoleh jatah. "Jadi, alokasi anggaran tambahan itu bukan kepada siapa akan diberikan, tetapi basisnya pada program yang akan dijalankan, bisa Kementerian Pendidikan Nasional atau Kementerian Agama," ungkapnya.

Data Kementerian Keuangan menunjukkan, realisasi penyerapan belanja di Kementerian Pendidikan Nasional hingga Mei 2011 mencapai 18,9 persen dari pagu Rp 55,6 triliun. Itu melambat dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2010 yang menyerap 29,7 persen dari pagu Rp 63,4 triliun. Realisasi belanja 2011 itu berarti di bawah rata-rata penyerapan belanja nasional yang ada di level 24 persen.

Dana abadi

Pelaksana Tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Bambang PS Brodjonegoro mengatakan, tambahan dana pendidikan sebesar Rp 16,6 triliun itu diperkirakan akan sulit diserap untuk mendanai proyek tepat waktu. Itu karena sisa tahun anggaran 2011 tinggal lima bulan ke depan. Atas dasar itu, tambahan dana pendidikan sebaiknya dialokasikan untuk dana abadi yang penggunaannya jangka panjang.

"Dana abadi itu untuk berjaga-jaga jangan sampai dana anggaran tidak terserap karena waktu yang tersedia terlalu pendek," ujarnya.

Menurut Bambang, dana abadi merupakan solusi masalah penyerapan yang akan sangat berat dipenuhi oleh kementerian yang menerima tambahan anggaran pendidikan itu. Meski demikian, untuk sisa tambahan anggaran pendidikan lainnya yang tidak menjadi dana abadi, tidak ada yang dapat dilakukan oleh Kementerian Keuangan selain berharap agar kementerian dan lembaga yang menerima dana itu berusaha keras agar dananya terserap seluruhnya.

Ini terjadi karena tidak ada satu pihak pun yang dapat mengalihkan alokasi dana pendidikan sebesar 20 persen itu karena sudah diatur konstitusi. (OIN)

Bandung, 8 Juli 2011
Koordinator
Humas dan Hukum,

Arden Lumbantoruan, SH.
NIP. 195601171980031011

BERITA PEMBANGUNAN PENDIDIKAN
DINAS PENDIDIKAN PROPINSI JAWA BARAT
Nomor :781 /Hms/VII/H/2011

Media Harian/Mingguan/Bulanan/Tabloid : ***PELITA***

Terbitan, Hari/Tanggal/Bulan/Tahun : Jum'at, 8 Juli 2011

Edisi/Halaman/Kolom : 12/ 1

Banyak Sekolah Langgar Aturan PPDB

Bandung, Pelita

Meskipun Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bandung telah mengeluarkan aturan, melarang sekolah melakukan pungutan atau sumbangan dalam bentuk apapun. Ironisnya ternyata masih banyak sekolah di Kota Bandung mulai dari tingkat SD/SMP /SMA dan SMK yang melanggar petunjuk teknis (juknis) penerima peserta didik baru (PPDB) 2011.

Padahal sudah dijelaskan bahwa pendaftaran serta daftar ulang tidak berkaitan dengan administrasi keuangan. Oleh karena itu, sebaiknya Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus segera turun. Kalau tidak persoalan ini semakin parah, jelas yang dirugikan orang tua murid. Hal ini tidak boleh dilakukan karena melanggar peraturan yang tertera dalam juknis PPDB.

Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik Jabar) Wahyudin Zarkasyi, sudah mengetahui tentang adanya informasi pungutan yang dilakukan oleh sekolah. Sebenarnya sekolah harus mematuhi apa yang sudah ditentukan oleh Disdik masing-masing Kabupaten/ Kota. "Aturan yang sudah keluarkan jangan dilanggar itu salah,"kata Wahyudin kepada Pelita diruang kerjanya Kamis (7/7).

Dijelaskannya, seperti Disdik Kota Bandung, sudah mengeluarkan aturan tersebut misalnya selain seragam, pelaksanaan daftar ulang tidak boleh dikaitkan dengan hal lain seperti pembelian buku, lembar kerja siswa (LKS), iuran bulanan, kegiatan peserta didik, administrasi, kesehatan, psikotes, dan lain-lain. Pola pembiayaan pendidikan di SD/MI dan SMP/MTs gratis karena sudah ada Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Menurut Wahyudin, hanya memfasilitasi orang tua siswa yang ingin berpartisipasi menjadi donatur, secara sukarela dan tidak mengikat, serta pengelolaannya dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kontribusi pendanaan dari orang tua siswa yang mampu ini memang diharapkan menjadi bagian penting dalam mekanisme subsidi silang.

Kepada pihak sekolah jangan terlalu berat membenani orang tua murid dengan berbagai pungutan yang dilakukan oleh sekolah. "Kalau masih ada, berarti sekolah tersebut sudah melanggar. Sanksi bagi sekolah yang melanggar tentunya sudah ada aturan mainya di-Kabupaten/Kota. Karena itu bukan sepenuhnya wewenang Disdik Jabar," tegasnya. **(id)**

Bandung, 8 Juli 2011
Koordinator
Humas dan Hukum,

Arden Lumbantoruan, SH.
NIP. 195601171980031011

BERITA PEMBANGUNAN PENDIDIKAN
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT
Nomor: 811 Hms/ VII/H/2011

Media Harian/Mingguan/Bulanan/Tabloid : *GALAMEDIA*

Terbitan, Hari/Tanggal/Bulan/Tahun : Rabu, 13 Juli 2011

Edisi/Halaman/Kolom : 1/5-6

Atasi Masalah di Tahun Ajaran Baru

Bentuk Pansus PPDB!

JLN. ACEH, (GM).-

Pansus penerimaan peserta didik baru (PPDB) perlu dibentuk karena persoalan peserta didik baru tiap tahun muncul dan tak pernah selesai. Sebab itu, urgensi pembentukan pansus PPDB akan dibahas seluruh anggota dan pimpinan Komisi D DPRD Kota Bandung, Rabu (13/7).

Menurut Sekretaris Komisi D DPRD Kota Bandung, Katmadja, persoalan peserta didik baru setiap tahunnya masih sama, seperti pungutan liar, titipan anak, dan lainnya. Bila harus menunggu hasil penyelidikan Dinas Pendidikan (Disdik), maka waktunya tak bisa ditentukan kapan bakal selesai.

"Sekolah pun berada di bawah Disdik, sementara permasalahan peserta didik ini tiap tahun selalu muncul," ungkap Katmadja di Gedung DPRD Kota Bandung, Jln. Aceh, Selasa (12/7).

Dengan kondisi itu, maka Katmadja memandang perlu dibentuknya pansus PPDB. "Menurut saya perlu dibentuk pansus, apalagi Komisi D yang membidangi pendidikan perlu tahu dengan masalah pendidikan yang ada di Kota Bandung," terangnya.

Pada kenyataannya, kata Katmadja, banyak laporan masyarakat terkait pungutan liar di sekolah pada PPDB. Terlepas, komite sekolah pun disinyalir berpihak pada sekolah terkait permasalahan PPDB ini. Sebab itu, Komisi D sangat terbantu dengan adanya LSM yang mengawasi dan

Bersambung ke hlm. 19 klm. 5

Bandung, 13 Juli 2011
Humas dan Hukum
Koordinator,

Arden Lumbantoruan, SH
Nip. 19561171198031011

BERITA PEMBANGUNAN PENDIDIKAN
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT
Nomor: 812 Hms/ VII/H/2011

Media Harian/Mingguan/Bulanan/Tabloid : ***REPUBLIKA***

Terbitan, Hari/Tanggal/Bulan/Tahun : Rabu, 13 Juli 2011

Edisi/Halaman/Kolom : 6/1-3

MOS Tanggung Jawab Sekolah

Fernan Rahadi

JAKARTA — Suasana orientasi harus bernuansa pendidikan, terutama pendidikan karakter. Masa orientasi siswa (MOS), kata Wakil Menteri Pendidikan Nasional, Fasli Jalal, tidak boleh ada kekerasan fisik maupun verbal.

Dia meminta sekolah menjadi satu-satunya pihak yang menyelenggarakan MOS sekaligus bertanggung jawab terhadap pelaksanaannya. "Sekolah harus bertanggung jawab penuh. Jangan diserahkan ke pihak ketiga, seperti alumni atau swasta," ucapnya dalam apel kesiapan memasuki tahun pelajaran baru di SMAN 70 Jakarta, Selasa (12/7). Apel digelar serentak di ratusan ribu sekolah di Indonesia, sekaligus membuka kegiatan MOS.

Dia mengatakan, masa orientasi sudah jelas. Itu masa yang sangat kental untuk memperkenalkan bagaimana proses belajar mengajar yang dilalui di sekolah baru, bagaimana fasilitasnya, bagaimana memanfaatkannya, dan bagaimana gurunya. Selain itu, masa orientasi juga untuk mengenal prinsip-prinsip kewirausahaan, kreativitas, dan pembangunan karakter.

Fasli mengimbau supaya kegiatan MOS memperhatikan kebutuhan siswa terhadap rasa ingin dihargai. "Tidak boleh ada kegiatan yang menyebabkan siswa merasa direndahkan atau menjadi rendah diri," tuturnya

Sebagai kegiatan awal dalam tahun ajaran baru, lanjut Fasli, MOS diharapkan menjadi momentum untuk menumbuhkan karakter yang sesuai dengan nilai utama, seperti kedisiplinan, tanggung jawab, etos kerja, sopan santun, dan lain-lain.

Dia mengatakan, cara sekolah mengembangkan pendidikan karakter untuk siswanya bisa melalui berbagai kegiatan. Ada yang pintu masuknya kewirausahaan, keagamaan, sekolah hijau, palang merah remaja, atau kantin kejujuran. "Itu kami serahkan ke masing-masing sekolah," tuturnya.

■ **ed:** burhanuddin bella

Bandung, 13 Juli 2011
Humas dan Hukum
Koordinator,

Arden Lumbantoruan, SH
Nip. 19561171198031011

BERITA PEMBANGUNAN PENDIDIKAN
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT
Nomor: 888 Hms/ VII/H/2011

Media Harian/Mingguan/Bulanan/Tabloid : *PIKIRAN RAKYAT*

Terbitan, Hari/Tanggal/Bulan/Tahun : *Kamis*, 28 Juli 2011

Edisi/Halaman/Kolom : 8/3-4

Pelatihan Manajemen Kepala Sekolah Pengembangan Lesson Study



*Kepala Dinas Pendidikan Kab. Sumedang, Drs. Sanusi Mawi, MSi (tengah) tampak menyampaikan sambutannya saat Pelatihan Manajemen Kepala Sekolah, di SMPN 5 Sumedang baru-baru ini.**

DINAS Pendidikan Kab Sumedang mengadakan Pelatihan Manajemen Kepala Sekolah dalam mengelola Lesson Study (LS). Acara yang diikuti para kepala SMP se Kab Sumedang dan Kepala SMA se Kab Sumedang tersebut, berlangsung di SMPN 5 Sumedang pada 16 Juli 2011. Dalam pelatihan kali ini sengaja diundang para kepala SMA sebagai suatu ekpansi pengembangan LS pada jenjang SMA. Menurut Kepala Seksi Mutu Pendidik Drs. Edi Suwardi, M.Pd, pada tanggal 11 dan 12 Mei 2011 telah diadakan pelatihan fasilitator MGMP SMA, MGMP SMP non MIPA, dan pengurus KKG yang tidak mendapatkan DBL Bermutu. Diharapkannya, keberadaan MGMP dan KKG pada tahun pelajaran 2011/2012 dapat beraktivitas kembali sesuai kebutuhan dan kepentingan pengembangan profesi dan karir guru yang bersangkutan. Sehubungan Kab Sumedang sebagai kabupaten pertama di Jabar yang melaksanakan LS sebagai pembinaan guru di MGMP MIPA SMP, ungkapnya, sebagian besar guru sudah merasakan manfaatnya. Karenanya, di MGMP SMA pun diadakan hal yang sama, yaitu LS sebagai pembinaanya. Edi Suwardi mengemukakan, dengan diundangnya kepala SMA sebagai peserta pelatihan diharapkan adanya sinergitas antara kepala sekolah dengan guru, yaitu kepala sekolah memfasilitasi guru mengembangkan keprofesiannya di MGMP dan guru memanfaatkan fasilitas yang diberikan kepala sekolah dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan profesinya. Selain itu, diharapkan pula adanya komitmen keberlanjutannya LS di Kab Sumedang.

Menurut Kepala Dinas Pendidikan Kab Sumedang, Drs. Sanusi Mawi, MSi, tujuan dan sasaran kegiatan ini adalah meningkatkan peran kepala sekolah dalam penjaminan peningkatan mutu pembelajaran yang terus menerus dan meningkatkan pemahaman kepala sekolah tentang kegiatan LS serta penguatan terhadap keberlanjutan LS di sekolah. Adapun sasarannya adalah para kepala SMP dan SMA se Kab Sumedang. Salah seorang peserta pelatihan, Enjan Takarir (Kepala SMPN 3 Cisitu) mengatakan, training dan penguatan LS sangat diperlukan oleh semua unsur pendidikan terutama Dinas Pendidikan, Pengawas bahkan perlu mengajak komite sekolah. LS diperlukan untuk peningkatan mutu pendidikan di sekolah, serta mengondisikan terbentuknya masyarakat yang mencintai pembelajaran. Dengan progam LS yang dikembangkan JICA / PELITA di Kab Sumedang, para kepala sekolah dapat melaksanakan peranannya sebagai supervisor, motivator, dan inovator dalam pembelajaran. Bagi guru, LS memberikan pengetahuan tentang adanya kelemahan dan kekurangan dalam layanan pembelajaran untuk peserta didiknya, sehingga kelak peserta didik akan lebih dilayani secara profesional dan bermartabat dalam pembelajaran di sekolah. Kegiatan LS ini sebaiknya melibatkan orang tua peserta didik saat *open* kelas dan ikut mengamati pembelajaran anaknya secara langsung **(ME-03)*****

Bandung, 28 Juli 2011
Humas dan Hukum
Koordinator,

Arden Lumbantoruan, SH
Nip. 19561171198031011

BERITA PEMBANGUNAN PENDIDIKAN
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT
Nomor: 891 Hms/ VII/H/2011

Media Harian/Mingguan/Bulanan/Tabloid : *PELITA*

Terbitan, Hari/Tanggal/Bulan/Tahun : *Kamis*, 28 Juli 2011

Edisi/Halaman/Kolom : 5/6-7

Minat Kuliah Masih Rendah

Jakarta, Pelita

Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) mengakui angka partisipasi kasar (APK) pendidikan tinggi (PT) masih rendah. Hal itu terungkap dalam rapat dengar pendapat Komisi X DPR dengan Mendiknas M Nuh baru-baru ini.

Mendiknas menyatakan, penduduk usia 19-23 tahun sekitar 19,84 juta. Secara nasional pada 2010, APK mencapai 26,3 persen. Pada tahun ini ditargetkan ada percepatan peningkatan APK PT menjadi 29,7 persen.

Dibandingkan APK negara tetangga, kata Mendiknas, Indonesia jauh tertinggi. Pada 2008, APK PT di Korea Selatan mencapai 92,6 persen, Jepang 57,3 persen, Singapura 55,9 persen, Thailand 45,9 persen, dan Malaysia 28,6 persen. "APK PT Indonesia memang perlu ditingkatkan dengan cepat," M Nuh.

Menurut Mendiknas, PT mempunyai peran strategis dalam menyumbang daya saing bangsa melalui penyediaan sumber daya manusia unggul. Hasil karya pembangunan riset dan teknologi yang relevan dan berdaya saing, kata dia, hanya terwujud jika APK PT tinggi.

Karena itu, pihaknya dalam mengelola APBN Perubahan 2011 mengarahkan untuk meningkatkan daya tampung dan saing. Secara khusus ditujukan untuk penyiapan pendirian community college, penguatan politeknik, dan penguatan PT di daerah perbatasan. Kemendiknas menganggarkan dana hingga Rp 2,939 triliun. **(zis)**

Bandung, 28 Juli 2011
Humas dan Hukum
Koordinator,

Arden Lumbantoruan, SH
Nip. 19561171198031011

BERITA PEMBANGUNAN PENDIDIKAN
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT
Nomor: 890 Hms/ VII/H/2011

Media Harian/Mingguan/Bulanan/Tabloid : *KOMPAS*

Terbitan, Hari/Tanggal/Bulan/Tahun : *Kamis*, 28 Juli 2011

Edisi/Halaman/Kolom : 12/2-5

BOS Dinaikkan, Seluruh Pungutan Dilarang

Bappenas Sudah Menyetujui

JAKARTA, KOMPAS — Kementerian Pendidikan Nasional mengusulkan kenaikan anggaran bantuan operasional sekolah pada 2012 sekitar 39,35 persen lebih tinggi daripada pagu definitif tahun 2011. Jika kenaikan ini disetujui DPR, sekolah dilarang memungut biaya apa pun kepada peserta didik.

"Jika BOS (bantuan operasional sekolah) dinaikkan, seluruh pembiayaan pendidikan di semua lini dapat tertutup. Dengan demikian, tak boleh ada lagi pungutan di sekolah-sekolah," ujar Wakil Menteri Pendidikan Nasional Fasli Djalal di Jakarta, Selasa (26/7) malam, saat berbicara dalam Diskusi Terbatas APBN.

Menurut Fasli, struktur biaya pendidikan memiliki tiga komponen, yakni pertama biaya pengelolaan pendidikan. Kedua, biaya di satuan pendidikan. Ketiga, biaya pribadi peserta didik.

Selama ini, BOS hanya menutup dua komponen biaya, yakni biaya pengelolaan pendidikan dan biaya di satuan pendidikan. Jika pagu anggaran BOS dinaikkan pada 2012, ketiga komponen biaya pendidikan itu akan tertutupi

Anggaran BOS

Data Kementerian Pendidikan Nasional menunjukkan, pada tahun 2011 jumlah siswa yang harus dibiayai pemerintah adalah sebanyak 44,29 juta orang sehingga total pagu indikatif anggaran BOS yang disediakan mencapai Rp 19,858 triliun. Adapun tahun 2012 diperkirakan ada kenaikan jumlah siswa yang menjadi dasar perhitungan BOS, yakni jadi 44,712 juta orang. Dengan rencana kenaikan sekitar 39,35 persen, anggaran BOS yang diusulkan Kementerian Pendidikan Nasional meningkat menjadi Rp 27,673 triliun pada 2012.

"Kami sudah mendapatkan persetujuan dari Bappenas," tutur Fasli.

Dari Rp 27,673 triliun usul anggaran 2012, Kementerian Pendidikan Nasional mengalokasikan sekitar Rp 18,17 triliun untuk 31,328 juta siswa sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah. Sisanya sebesar Rp 9,5 triliun untuk 13,384 juta siswa SMP dan madrasah tsanawiyah.

Secara terpisah, Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati menegaskan, pihaknya mendukung seluruh usul yang memiliki niat baik, termasuk kenaikan anggaran BOS. Namun, realisasi anggarannya harus tetap dikaji mendalam dan disetarakan kebutuhan anggaran secara menyeluruh di APBN. "Kami harus melihat postur anggaran pendidikan secara menyeluruh sebab ini terkait dengan anggaran yang sangat besar," tuturnya. (OIN)

Bandung, 28 Juli 2011
Humas dan Hukum
Koordinator,

Arden Lumbantoruan, SH
Nip. 19561171198031011

BERITA PEMBANGUNAN PENDIDIKAN
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT
Nomor: 895 Hms/ VII/H/2011

Media Harian/Mingguan/Bulanan/Tabloid : ***REPUBLIKA***

Terbitan, Hari/Tanggal/Bulan/Tahun : *Jum'at*, 29 Juli 2011

Edisi/Halaman/Kolom : 2/1-2

Tim Investigasi BOS Dibentuk

Teguh Firmansyah

JAKARTA — Pemerintah akan membentuk tim investigasi penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Pembentukan tim dilakukan mengingat banyaknya daerah yang belum menyalurkan dana bantuan itu.

Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh menjelaskan, pemerintah akan menyelidiki mengapa anggaran bantuan itu sulit sekali tersalurkan, padahal anggarannya telah turun ke daerah. "Bagi duit *aja kok* (pemda) *gak* bisa, apalagi cari duit," ujarnya, seusai rapat Komite Pendidikan di kantor Wapres, Kamis (28/7).

Berbagai dugaan muncul mengapa anggaran itu tidak sampai ke sekolah. Salah satunya, uang telah terpakai atau dialihkan untuk belanja keperluan lain. Namun, Nuh tidak mau menyimpulkan lebih dulu. "Kita akan selidiki dugaan tersebut."

Selama ini, lanjut Nuh, pemerintah daerah beralasan dana bantuan belum bisa diberikan karena menunggu laporan pertanggungjawaban dari sekolah. Padahal, dalam surat edaran bersama tidak ada kesepakatan soal itu.

Nuh menilai alasan tersebut cenderung mengada-ada. "Ini hanya masalah komitmen dari bupati dan wali kota," katanya.

Menurut Nuh, tim investigasi akan dibentuk dalam dua pekan ini. Tim terdiri atas Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional, dan Inspektorat Kementerian Dalam Negeri.

Tim akan meminta penjelasan kepada pemerintah daerah terkait terhambatnya penyaluran dana bantuan itu. "Kita akan tanyakan satu per satu ke daerah. Kita juga akan mencari langkah terobosan supaya dana bantuan tersebut bisa disalurkan," tuturnya.

Beragam opsi masih dikaji, termasuk mengembalikan kepada mekanisme lama dengan penyaluran langsung dari pemerintah pusat ke sekolah-sekolah.

Kabupaten atau kota yang belum menyalurkan dana BOS pada triwulan kedua 2011 sebanyak 39 daerah atau 7,5 persen dari total daerah. Bantuan yang belum tersalurkan mencapai sekitar Rp 300 miliar. Jumlah ini meningkat dibandingkan triwulan kesatu yang hanya satu daerah.

Daerah yang belum menyalurkan, antara lain, Klungkung (Bali), Pasuruan (Jatim), Trenggalek (Jatim), Nias Selatan (Sumut), Sumba Tengah (NTT), Timor Tengah Utara (NTT), Dogiyai (Papua), Intan Jata (Papua), Supiori, (Papua), dan Tolikara (Papua). "Paling banyak Papua," kata Nuh.

Bahkan, Kabupaten Supiori, kata Mendiknas, belum menyalurkan BOS pada triwulan pertama lantaran konflik di tingkat pimpinan daerah. Hingga 27 Juli 2011 untuk triwulan III-2011 baru 23 kabupaten/kota yang sudah menyalurkan dana BOS ke sekolah.

Dibandingkan realisasi penyaluran dana BOS 2010 yang memakai mekanisme lama penyaluran dana BOS 2011 jauh lebih lambat. Nuh mengakui, akibat lambatnya penyaluran dana BOS, sekolah harus berutang untuk menutupi kekurangan biaya operasional.

■ ed: burhanuddin bella

Bandung, 29 Juli 2011
Humas dan Hukum
Koordinator,

Arden Lumbantoruan, SH
Nip. 19561171198031011

BERITA PEMBANGUNAN PENDIDIKAN
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT
Nomor: 894 Hms/ VII/H/2011

Media Harian/Mingguan/Bulanan/Tabloid : ***PIKIRAN RAKYAT***

Terbitan, Hari/Tanggal/Bulan/Tahun : *Jum'at*, 29 Juli 2011

Edisi/Halaman/Kolom : 7/1

Agustus, Perbaikan Mekanisme Dana Bos

JAKARTA, (PR).-

Wakil Presiden Boediono memberikan tenggat atau batas waktu hingga minggu kedua Agustus 2011, untuk menyelesaikan perbaikan mekanisme Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

"Kita dikasih maksimal dua minggu (oleh Wapres Boediono-**red.**) untuk rumuskan," kata Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh, sesuai rapat Komite Pendidikan yang membahas BOS, di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (28/7).

Menurut Mendiknas, penataan dan percepatan penyaluran BOS akan dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat. Untuk itu, pihaknya akan membuat tim yang juga melibatkan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, serta inspektorat, baik di Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) maupun di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Nuh mengatakan, penyaluran dana BOS sampai saat ini masih banyak yang tersendat, bahkan belum tersalurkan. Berdasarkan data pemerintah, masih ada satu kabupaten di Papua, yaitu Kabupaten Supiuri, yang belum selesai menyalurkan dana BOS triwulan I-2011.

Sementara untuk triwulan II-2011, masih ada 39 kabupaten/kota yang belum selesai menyalurkan dana BOS atau baru tersalurkan 74 persen. Triwulan III-2011 (hingga 27 Juli 2011) baru 29 kabupaten/kota, yang sudah menyalurkan dana BOS ke sekolah atau baru 4,6 persen.

Sementara itu, Juru Bicara Wakil Presiden Yopie Hidayat mengatakan, dalam rapat BOS yang dipimpin oleh Wakil Presiden telah diidentifikasi penyebab keterlambatan.

Berdasarkan peninjauan Kemendiknas, keterlambatan penyaluran dana BOS akibat masih banyak daerah yang belum mengubah tata cara penyaluran dana BOS, yaitu mengikuti mekanisme baru sesuai dengan Permendagri 21/2011.

Pada sejumlah daerah, kerap terjadi keterlambatan penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Bendahara pengeluaran Pembantu (BPP) oleh bupati dan wali kota. Serta, masih ada ketentuan di Permendagri yang baru yang memerlukan penyempurnaan.

Berdasarkan catatan, dana BOS pada awal 2006 sebanyak Rp 5 triliun dan kini meningkat menjadi Rp 16 triliun. Dengan tambahan BOS dari Kementerian Agama, totalnya Rp 20 triliun.

Bandung, 29 Juli 2011
Humas dan Hukum
Koordinator,

Arden Lumbantoruan, SH
Nip. 19561171198031011

BERITA PEMBANGUNAN PENDIDIKAN
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT
Nomor: 896 Hms/ VII/H/2011

Media Harian/Mingguan/Bulanan/Tabloid : ***HARIAN PELITA***

Terbitan, Hari/Tanggal/Bulan/Tahun : *Jum'at*, 29 Juli 2011

Edisi/Halaman/Kolom : 12/2-4

SMK Negeri Kekurangan Murid

Bekasi, Pelita

Penerimaan siswa baru di SMP Negeri, SMA Negeri dan SMK Negeri di Kota Bekasi telah usai. SMP dan SMA Negeri banyak siswa pendaftar yang tidak tertampung, sebaliknya sejumlah SMK Negeri di Kota Bekasi kekurangan murid.

Kasi data dan Program, Bina Program Disdik Kota Bekasi, Agus Enab, Kamis (28/7) membenarkan adanya SMK Negeri di Kota Bekasi yang kekurangan murid pada penerimaan siswa baru 2011/2012 ini.

Seperti, SMK Negeri 6 dari daya tampung yang tersedia sebanyak 136 siswa yang diterima dan masuk ke sekolah itu hanya 102 siswa, juga SMK Negeri 7 daya tampung sebanyak 136 yang masuk hanya 101 siswa. Begitu pula SMK Negeri 3 daya tampungnya ada 510 siswa tetapi yang daftar ulang hanya 465 siswa, dengan demikian sekolah masih kekurangan 45 siswa.

Menurut Agus, sebagian besar orang tua murid yang anaknya lulus SMP belum sepenuhnya tertarik melanjutkan anaknya ke SMK, mereka masih tertarik masuk ke SMA. Padahal, kalau dilihat peluang lapangan kerja lulusan SMK lebih berpeluang dibandingkan lulusan SMA. "Ini perlu pemahaman, apalagi banyak lulusan SMA yang tidak melanjutkan ke perguruan tinggi," jelas Agus.

Ditempat terpisah Kepla SMK Negeri 3 Kota Bekasi, Uu Saeful Mikdar ketika dikonfirmasikan soal kekuranag siswa disekolahnya membenarkan. Katanya, sebenarnya saat pendaftaran dibuka jumlah siswa yang mendaftar mencapai 872 siswa.

Namun ketika daftar ulang dilakukan jumlah siswa yang mendaftar ulang hanya sebanyak 465 siswa, sementara daya tampung yang tersedia ada 510 siswa. Ini terjadi karena jurusan yang dituju siswa tidak dapat dipenuhi, karena untuk bisa diterima menjadi siswa baru dengan jurusan yang dituju, disesuaikan kemampuan siswa melalui test.

"Masing-masing jurusan di SMK Negeri 3, ada kreteria nilainya. Mungkin karena tidak sesuai jurusan yang diharapkan, hingga siswa tidak melakukan daftar ulang," katanya. Saat ini SMK Negeri 3 ada empat jurusan. Yakni, jurusan Teknik Komputer Jaringan (TKJ), Akutansi, Akumodasi Perhotelan dan Tata Boga. **(ans)**

Bandung, 29 Juli 2011
Humas dan Hukum
Koordinator,

Arden Lumbantoruan, SH
Nip. 19561171198031011

2.3 Deskripsi dan Contoh Kegiatan Insidentil Selama PKL

Selama kegiatan praktek yang dilaksanakan penulis dituntut untuk melaksanakan kegiatan kerja yang tidak sering dilakukan, pekerjaan yang sifatnya mendadak atau sewaktu-waktu diperlukan oleh instansi ataupun perusahaan. Pekerjaan Insidentil yang dilakukan penulis seperti :

2.3.1 Pengenalan Lingkungan PKL

Dalam menghadapi lingkungan baru apalagi sebuah instansi pemerintah yang tidak kecil perlu adanya pengenalan lingkungan. Kegiatan yang bersifat Insidentil yang dilakukan di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Hari pertama PKL adalah dengan melakukan penganalan lingkungan baik itu pengenalan staf atau karyawan serta bangunan-bangunan dan ruangan-ruangan yang berada di Dinas Pendidikan. Adapun bukti penulis telah melakukan pengenalan yaitu dengan adanya dokumentasi yang diambil oleh penulis di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat antara lain sebagai berikut :

Gambar 2.1

Bangunan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat



Sumber : Arsip Penulis 2011

Gambar 2.2

Aktifitas Praktek Kerja Lapangan Dengan Beberapa Staf Humas



Sumber : Arsip Penulis 2011

2.3.2 Membuat *Press Release*

Dalam kegiatannya Mahasiswa PKL dilatih untuk bisa membuat sebuah *press release*. Dalam kaitannya pembuatan *press release* ini bersifat insidentil. Karena tidak setiap hari mahasiswa PKL harus membuat *press release*. Apabila sangat mendesak dan memang kepentingan Dinas Pendidikan untuk membuat *press release* untuk memudahkan wartawan dalam memperoleh berita. Dalam membuat *press release* penulis diarahkan oleh staf humas Dinas Pendidikan untuk dapat membuat *press release* yang baik. Adapun salah satu *press release* dapat dilihat sebagai berikut :

Gambar 2.3

Press Release Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Menganai BOS

PRESS RELEASE
DINAS PENDIDKAN PROVINSI JAWA BARAT
Dr. Radjiman No. 6, Bandung. Telp (022) 4264813, Fax (022) 4624881

Sesuai dengan Program yang dicanangkan Kementrian Pendidikan Nasional yaitu Program Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat melaksanakan Sosialisasi Program BOS sebagai agenda awal Sosialisasi Dana BOS tersebut. Sosialisasi tersebut berlangsung di Hotel Ciloto Indah yang terletak di Kabupaten Cianjur, Senin (11/7).

Acara tersebut dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Provinsi Jawa Barat, serta Pejabat-pejabat dari Bidang Pendidikan Dasar Dinas Provinsi Jawa Barat dan peserta Sosialisasi Dana BOS. Dalam Program tersebut, dilakukan sosialisasi mengenai anggaran Dana BOS yang diterima sekolah di seluruh Kabupaten/Kota dari Tingkat SD,SDLB,MI, dan SMP,SMPLB,SMP. untuk Tingkat SD,SDLB,MI mendapat biaya sebesar Rp. 25.000,-/siswa/thn sedangkan tingkat SMP,SMPLB,SMP terbuka mendapat biaya Rp. 127.000,- /siswa/tahun.

Sosialisasi Program Dana BOS ini dimaksudkan untuk memberikan pengarahan serta penjelasan pada peserta agar mengetahui secara jelas mengenai Tujuan, Sasaran, serta Anggaran yang detil dari Program Dana BOS ini. Dalam Sosialisasi ini juga, diharapkan Pihak Sekolah dapat mensosialisasikan kembali kepada Orang tua Siswa, mengenai Program Dana Bantuan Operasional Sekolah yang telah dijalankan oleh Disdik Jabar untuk meringankan beban biaya operasional Siswa Pendidikan Dasar menuju Jawa Barat Bebas Putus Jenjang Sekolah.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Prof.Dr.H.Moh. Wahyudin Zarkasyi, CPA., mengatakan bahwa penyaluran dana BOS hendaknya dilaksanakan secara tepat sasaran, tepat waktu dan tepat jumlah, sehingga dalam pelaksanaannya dapat lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Saya berharap, para pengelola dana BOS Provinsi tahun 2011ini, baik di tingkat Kabupaten, Kota, dan sekolah, dapat mengelola dana BOS ini dengan sebaik-baiknya sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan dan memperhatikan ketentuan yang berlaku.” ujar Kadisdik.

Kadisdik berharap pula bahwa pemberian dana BOS Provinsi ini dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas siswa dan guru, khususnya di Provinsi Jawa Barat. Menurutnya, tujuan pemberian bantuan dana BOS Provinsi, secara tidak langsung telah memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat dengan membuka akses, serta memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya kepada masyarakat yang kurang mampu untuk menyekolahkan anaknya.

Sumber : Arsip Humas Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat

2.3.3 Dokumentasi

Dalam kegiatannya mahasiswa PKL dilati untuk terbiasa dalam mengabadikan suatu kegiatan yang diselenggarakan. Dalam kaitannya dokumentasi ini bersifat insidentil. Karena tidak setiap hari mahasiswa PKL harus melakukan dokumentasi. Apabila sangat mendesak dan memang kepentingan Dinas Pendidikan melakukan dokumentasi terhadap suatu kegiatan. Berikut merupakan hasil dokumentasi terhadap suatu kegiatan antaralain :

Gambar 2.4

Kegiatan PORPEMPROV di Gedung Sate



Sumber : Arsip Penulis 2011

Gambar 2.5

Tim PORPEMPROV Dinas Pendidikan Jawa Barat



Sumber : Arsip Penulis 2011

Gambar 2.6

Pembukaan PORPEMPROV oleh Wakil Gubernur Jawa Barat



Sumber : Arsip Penulis 2011

Gambar 2.7

Bangunan Mesjid Bitush Sholihin dalam acara menyambut Ramadhan di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat



Sumber : Arsip Penulis 2011

2.4 Deskripsi Tentang Humas

Saat ini di Indonesia humas atau lebih dikenal dengan *Public Relations* sudah semakin dikenal walaupun posisi dan fungsinya masih dalam tahap yang belum memuaskan. Dalam suatu lembaga atau perusahaan para *Public Relations* sangat penting untuk memperlancar tujuan dan suksesnya kegiatan komunikasi yang berkaitan dengan kepentingan lembaga atau perusahaan dan publiknya.

Public Relations dapat diartikan sebagai hubungan-hubungan atau hubungan antar *public.* Secara harfiah *public* adalah sekelompok orang yang

mempunyai minat dan kepentingan yang sama pada suatu hal, sedangkan *relations* adalah dalam bentuk jamak memiliki hubungan-hubungan.

Definisi *Public Relations* menurut kamus IPR, 197 adalah

" keseluruhan upaya yang dilangsungkan secara terencana dan berkesinambungan dalam rangkamenciptakan dan memelihara niat baik dan saling pengertian antar suatu organisasi dengan segenap khalayaknya"

Serta definisi *Public Relations* menurut Frank Jefkins, dalam buku "*Public Relations"*

"Public Relations adalah sesuatu yang merangkum keseluruhan komunikasi yang terencana, baik itu kedalam maupun keluar, antar sesuatu organisasi dengan semua khalayak dalam rangka mencapai tujuan spesifik yang berlandaskan pada saling pengertian". (Jefkins, 1995)

Dari definisi diatas dapat dilihat bahwa prinsipnya *Public Relations* menekankan pada "suatu bentuk komunikasi" maksudnya bahwa kegiatan PR adalah kegiatan komunikasi, karena PR merupakan bagian dari komunikasi, dimana komunikasi ini tekanannya pada komunikasi organisasi dengan sasaran komunikasinya adalah untuk publik didalam organisasi dan publik luar organisasi, dimana landasan utama dari komunikasi ini adalah saling pengertian diantara keseluruhan publik yang berkepentingan terhadap organisasi tersebut, tetapi tidak terbatas pada saling pengertian saja meliankan juga berbagai macam tujuan khusus lainnya seperti contoh penanggulangan masalah-masalah komunikasi yang memerlukan suatu perubahaan tertentu.

Berdasarkan adanya saling pengertian tersebut diharapkan dapat tercapai tujuan yang spesifik yaitu dari kegiatan komunikasi PR tercipta suatu kerjasama yang harmonis diantara kedua belah pihak baik itu publik terhadap organisasi maupun sebaliknya sehingga timbul citra yang positif dan tujuan perusahaan secara keseluruhan dapat tercapai.

Dalam *Pulic Relations* terdapat suatu usaha untuk mewujudkan hubungan yang harmonis antara suatu badan atau organisasi dengan publiknya, usaha untuk menanamkan kesan yang menyenangkan sehingga menimbulkan opini publik yang menguntungkan bagi kemajuan badan atau organisasi. Semua itu dapat dilaksanakan oleh PR dengan menunjukan hal-hal positif tentang apa yang dilaksanakan dan direncanakan.

Begitu pula dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang senantiasa menggunakan humas untk menjalankan hubungan dengan berbagai pihak. *Public Relations* tidak sama dengan sekedar menjual senyum, propaganda dengan tujuan memperoleh kemenangan atau keberhasilan sendiri, atau mendekati pers dengan tujuan untuk memperoleh suatu pembariataan, tetapi lebih dari itu karena *Public Relations* mengandalkan strategi yaitu agar badan atau oragnisasi dipercaya oleh pihak-pihak yang berhubungan dengan badan atau organisasi.

Dalam kaitannya Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat menjalankan *Public Relations* yang masih bersifat *Method Of Comunication* yaitu humas yang masih dibawah naungan divisi lain yang pada kesempatan kali ini humas Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat masih berada pada Divisi Sub. Bagian

Kepegawaian & Umum. Sehingga humasnya belum *State Of Being* belum berdiri sendiri. Walaupun Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat termasuk instansi pemeritah yang terbilang besar namun humasnya belum berdiri sendiri, tetapi tidak mengurangi peran dari *Public Relations* dalam suatu badan atau organisasi sangat penting dalam menciptakan komunikasi timbal balik, untuk membangun hubungna baik dengan publiknya.

2.5 Analisis Kegiatan Humas Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat

Posisi Humas Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat belum bersifat *State Of Being*, karena Humasnya masih berada dibawah divisi lain yaitu Sub. Bag Kepegawaian dalam hal ini Humas Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat masih bersifat *Method Of Comunication*. Humas Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dipimpin oleh Koordinator Humas dan Hukum yang bertugas mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan Humas yang terencana dan terarah, untuk membentuk atau membangun citra positif bagi instansi.

Adapun kegiatan-kegiatan Humas Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebagai berikut :

a. Mencari Berita dari Media Cetak, kegiatan yang rutin dilakukan untuk mencari berita yang berkaitan dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

b. Membuat dan Menyusun Potongan Berita, Kegiatan rutin yang dilakukan setiap hari untuk mendokumentasikan berita-berita yang dimuat di surat kabar yang berkaitan dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.
c. Membuat *Press Release*, Tulisan yang dibuat Humas Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat mengenai kegiatan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang dianggap penting untuk dipublikasikan kepada Publik umum maupun Wartawan.
d. Dokumentasi, Kegiatan dokumentasi dari kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat seperti merekam video atau foto yang akan disimpan dalam arsip dokumentasi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.
e. Informasi Wartawan, Humas Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat melayani Wartawan dari berbagai media yang hampir setiap hari memenuhi ruangan Humas.
f. Operator web/situs Instansi, Humas Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat menjalankan Web/situs Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang harus di cek setiap hari sebagai alternatif berinteraksi dengan Publik.

Ada yang menjadi kendala bagi Humas Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yaitu, faktor anggaran biaya kegiatan yang tidak dikhususkan bagi Humas, menjadikan kendala tersendiri bagi terpenuhinya tugas-tugas kehumasan yang ada disetiap Instansi Pemerintah termasik Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

2.6 Deskripsi Tentang Pelayanan Terhadap Mahasiswa PKL

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat adalah sebuah instansi yang berada di bawah kewenangan pemerintah Provinsi Jawa barat. Humas Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat masih berada didalam bagian Sub. Bagian Kepegawaian & Umum. Humasnya belum berdiri sendiri, walaupun dibawah naungan Sub. Bagian Kepegawaian & Umum, Humas Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat memiliki Staf serta ruangan sendiri untuk mengurusi hal-hal yang berhubungan dengan kehumasan.

Dalam kesempatan ini penulis melakukan PKL di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat tepatnya dibagian humas. Dimana penulis memilih untuk PKL dibagian humas dikarenakan sesuai dengan spesialisasi keilmuan penulis. Pelayanan yang dilakukan staf humas khususnya merupakan pekerjaan wajib yang harus dilakukan oleh staf humas. Begitupun pelayanan yang diberikan kepada penulis merupakan pelajaran yang diberikan kepada mahasiswa. Hal-hal yang mereka berikan kepada mahasiswa PKL adalah keakraban lingkungan, kegiatan ini merupakan pekerjaan yang mudah secara teoritis, namun pada prakteknya lebih sulit. Selama penulis mengikuti kegiatan Prakek Kerja Lapangan di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat banyak yang didapatkan mulai dari pengenalan lingkungan yang terdiri dari berbagai macam orang yang harus dikenali penulis, dapat mengetahui banyak mengenai dokumentasi kegiatan, penulis banyak diberikan ilmu bagaimana cara membuat potongan berita yang baik, keakraban, senyum, tawa dan kekeluargaan yang mereka jalin dengan terbuka merupakan

salah satu penghubung kedekatan diantara mahasiswa PKL dengan karyawan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.